

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI  
KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)**

**THE EVALUATION OF BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT POLICY  
IN IMPLEMENTING ELECTRONIC EMPLOYEE'S CARD**

**DEDI SAPUTRA**

**Alumni Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung,  
Bandar Lampung**

**ABSTRACT**

The enactment of Regulation of Chief of National Civil Employee (BKN) number 7 in 2008 about the civil servant's electronic employee's card resulted in conversion of employee's card (KARPEG) into Electronic Civil Servant's Card. The implementation of this Electronic Civil Servant's Card is a realization of electronic government by using information technology to help improving quality in civil servant employment to be more effective and efficient.

This research was located in Bandar Lampung government. The objective of this research was to evaluate the program performance and implementation in conducting Bandar Lampung government policy about electronic civil servant's card. This was a project monitoring evaluation research. Primary data were obtained from interviews by using snowball sampling. To ensure data credibility, observation and documentation were conducted.

The results showed that the implementation of electronic civil servant's card in Bandar Lampung government was not optimal. This was based on unachieved of the main objective of the electronic civil servant's card as a replacement of civil servant's card. However, the implementation was administratively according to procedures determined by State Civil Servant Employment Agency (or BKN). To improve output of the implementation of electronic civil servant's card program in the future, the researcher recommends some suggestions. First,

rebuilding communication with Regional Government Bank in implementing banking service and coordinating with Financial and Regional Asset Management Agency of Bandar Lampung related to civil servant pay rolling through banking services. Second, coordinating and socializing with Regional Task Force Unit in functioning electronic civil servant's card in banking service. Third, maximizing pamphlet and leaflet about function of electronic civil servant's card in Regional Civil Employment Agency of Bandar Lampung.

Keywords : evaluation, policy implementation, electronic civil servant's card

### ABSTRAK

Pemberlakuan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik menyebabkan adanya konversi Kartu Pegawai menuju Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik merupakan wujud *Elektronik Government* dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian agar lebih efektif dan efisien.

Penelitian berlokasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja implementor dalam melaksanakan Kebijakan. Penelitian ini masuk dalam jenis *Project Monitoring Evaluation Research*, yaitu riset yang mengevaluasi proses implementasi suatu kebijakan (*on-going evaluation*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. selain itu, untuk menjamin kredibilitas data dilakukan juga observasi dan studi dokumentasi.

Kesimpulannya, Implementasi Kartu Pegawai Elektronik diLingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan hasil yang tidak optimal, ini didasarkan atas tidak tercapainya fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik. Namun demikian, secara administratif telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Untuk memperbaiki output program Implementasi KPE dimasa mendatang, yang perlu dilakukan : *pertama*, Membangun komunikasi dengan Bank Pemerintah Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dalam hal implementasi layanan perbankan; *kedua*, Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memfungsikan KPE; *ketiga*, Memaksimalkan proses sosialisasi dengan memanfaatkan fasilitas Internet dan menyediakan Pamflet & Leaflet tentang Kartu Pegawai Elektronik diBadan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

Kata kunci : evaluasi , implementasi kebijakan, kartu pegawai elektronik (KPE).

## **PENDAHULUAN**

Penerapan *Elektronik Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi, terutama internet) dengan tujuan utama memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik.

Kondisi ini disikapi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 mendefinisikan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yang memuat data Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya secara elektronik, pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yang dilengkapi Chip berkapasitas 64 KB. Kartu Pegawai (KARPEG) yang saat ini berlaku belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan dan pemberian pelayanan multiguna kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun dan keluarganya.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 7, 8 dan 9 menyatakan bahwa Fungsi dari Kartu PNS Elektronik antara lain *Updating* data Pegawai Negeri Sipil secara langsung melalui Anjungan yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota; Pelayanan Kesehatan (ASKES); Pelayanan Perumahan (TAPERUM); Pelayanan TASPEN; Tabungan Hari Tua (THT); Pelayanan Pensiun; Pelayanan Haji; Kartu ATM dan Transaksi Perbankan.

Kartu pegawai elektronik merupakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian agar lebih efisien dan efektif, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata tapi di sisi lain, layanan yang diterima oleh PNS itu sendiri masih sangat rendah, remunerasi agar PNS hidup layak pun juga belum sepenuhnya dapat dicapai.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, tentang kebijakan penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik, Pemerintah Kota segera melakukan Proses Pem-photoan Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan untuk pembuatan KPE oleh Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya BKD sebagai *leading sector* dalam penerapan Kebijakan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik mulai menjajaki Pihak Perbankan yang akan diajak bekerja sama dalam penfungsian layanan perbankan(Gaji).

Pergantian Pemerintahan dari Wali Kota Bandar Lampung Drs. Edy Sutrisno menuju Wali Kota Bandar Lampung yang baru Drs. H. Herman H.N., M.M., ternyata membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Kota Bandar Lampung. Kebijakan KPE seperti di 'tinggal'kan begitu saja. Kartu Pegawai Elektronik (KPE) sudah didistribusikan kepada  $\pm$  8000 PNS Kota Bandar Lampung tanpa adanya Layanan layanan perbankan. Hal ini dikarenakan penunjukan Bank yang akan melakukan layanan perbankan belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, selain itu juga dalam hal Pelayanan Kesehatan (ASKES), Pelayanan Perumahan (TAPERUM), dan Pelayanan TASPEN Pemerintah Kota Bandar Lampung belum melakukan kerja sama sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008. Hal ini tentu saja dapat mengganggu pelayanan dalam bidang kepegawaian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk mengukur apa yang sudah dicapai oleh kebijakan tersebut dan kemudian mengkomparasikan hasilnya dengan tujuan kebijakan sehingga nantinya akan dapat diidentifikasi sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Peneliti memilih tipe *'formative evaluation'* yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat program sedang berlangsung (*on going*). Peneliti mengkhususkan penelitian pada aspek evaluasi dan analisis terhadap implementator atau pelaksana kebijakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis *Project Monitoring Evaluation research* dengan menggunakan variasi pendekatan naturalistik (*The Naturalistic Approach*). Rossi *et al.* (1979:39) menyatakan bahwa monitoring evaluasi merupakan pekerjaan sistematis yang melihat apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan desain program yang bersangkutan, dan apakah program tersebut diarahkan kepada kelompok sasaran yang ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Guba dan Lincoln dalam Parsons (1995:563-564), *The Naturalistic Approach* merupakan pendekatan alternatif dalam melakukan analisis evaluasi kebijakan. Pendekatan ini diharapkan berjalan natural dan ada keterlibatan (partisipasi) evaluator pada lapangan yang menjadi sasaran evaluasi. Pendekatan naturalistik bersifat Naturalis (wajar) karena peneliti tidak berusaha memanipulasi atau bahkan menyimulasi suasana penelitian. Pendekatan ini cocok terutama dalam rangka mengevaluasi kebijakan pada saat kebijakan tersebut sedang berlangsung (*on going*).

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan fokus masalah penelitian sebagai berikut:

1. Aspek Implementor (aktor pelaksana kebijakan) yang difokuskan pada :
  - a. Pengetahuan pelaksana/implementor dalam memahami Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008.
  - b. Kemampuan dan ketepatan pelaksana/implementor dalam melaksanakan prosedur administratif (Peraturan Kepala Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008).

- c. Ketepatan proses Sosialisasi, dan kerja sama dengan pihak perbankan dalam Implementasi KPE.
2. Aspek Pegawai Negeri Sipil penerima Kartu Pegawai Elektronik yang difokuskan pada:
    - a. Responsivitas dari Pegawai Negeri Sipil dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
    - b. Kesesuaian prosedur manajerial dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
    - c. Kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian?
  3. Aspek Sumber daya, komunikasi, dan informasi (sumber daya selain manusia, termasuk sarana, prasarana, dan keuangan) yang difokuskan pada:
    - a. Proses Sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik kepada Pegawai Negeri Sipil (Media, cara, dan kendala).
    - b. Proses penanganan dan pelayanan informasi Kartu Pegawai Elektronik kepada Pegawai Negeri Sipil.
    - c. Penggunaan fasilitas, sarana, prasarana dalam pelaksanaan distribusi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara (*interview*), Studi Dokumentasi, Observasi, setelah data diperoleh dari lapangan, dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Pada penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga komponen analisis, menurut Matew Milles dan Haberman

(1992:16) yaitu: Reduksi data, Penyajian data (*display data*); dan Penarikan Kesimpulan (verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan satu demi satu menurut fokus masalah yang telah ditentukan pada awal penelitian berdasarkan teori-teori evaluasi kebijakan publik. Peneliti terlebih dahulu mengikuti tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi kebijakan diantaranya adalah menetapkan indikator pencapaian tujuan dan sasaran program.

Sasaran dari Program Kartu Pegawai Elektronik ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung tanpa terkecuali. Untuk menetapkan indikator pencapaian tujuan dan sasaran, apakah implementasi Kartu Pegawai Elektronik sudah mencapai target penulis akan membuat tabel pengukuran indikator pencapaian tujuan dan sasaran implementasi Kartu Pegawai Elektronik pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Tabel . Identifikasi Tujuan dan Sasaran Program serta Penetapan Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Implementasi Kartu Pegawai Elektronik

Tujuan Program	Indikator Tujuan Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
Konversi Kartu Pegawai (KARPEG) dengan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	a. Terkonversinya sedikitnya 90% Kartu Pegawai (KARPEG) menuju Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung b. Adanya Kerja sama dengan pihak ke-3 (rekanan) dalam hal ini adalah PT. Sucofindo,	Terpenuhinya Kartu Pegawai Elektronik sekitar 9.361 Pegawai Negeri Sipil dengan seluruh fungsi KPE dapat digunakan secara	a. Belum dilakukannya pendaftaran sekitar 1.500 pegawai negeri sipil (PNS) (yang belum memiliki KPE) b. Tidak profesional nya pihak ke-3 (Skofindo)



	<p>dalam hal perekaman data PNS</p> <p>c. Adanya Kerja sama dengan pihak Perbankan antara lain BNI, BRI dan Bank Lampung dalam Otentikasi layanan Perbankan (Gaji)</p> <p>d. Tersedianya Loker Pelayanan Informasi dan Kartu Pegawai Elektronik.</p>	multifungsi.	<p>dalam melakukan pemfotoan</p> <p>c. Fungsi dari KPE hanya sebagai “pengganti” dari KARPEG</p> <p>d. Tertundanya program KPE disebabkan penggantian walikota</p>
--	--	--------------	--

(Sumber : Analisis Peneliti, 2014)

Pada segi pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran, akan diukur dengan melihat indikator-indikator yang telah dirumuskan. Dari keempat *item* yang dijadikan indikator tujuan program, ada satu indikator yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan Program Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Adanya Kerja sama dengan pihak Perbankan antara lain BNI, BRI dan Bank Lampung dalam Otentikasi layanan Perbankan (Gaji). Indikator tersebut tidak terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan Program Implementasi Kebijakan Konversi Kartu Pegawai (Karpeg) menuju Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum tercapai secara sempurna.

Berdasarkan dimensi Fungsional, fungsi Kartu Pegawai Elektronik hanya sebatas sebagai “Pengganti” dalam artian secara fisik menggantikan Kartu Pegawai (KARPEG) namun fungsi sebenarnya yang diharapkan sebagai kartu multiguna, selain sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil diharapkan memberi manfaat untuk kemudahan pemberian layanan kepegawaian. Fungsi perbankan belum terlaksana, Pegawai Negeri Sipil masih saja menerima gaji secara tunai setiap awal bulan melalui Bendahara Gaji Satuan Kerja Perangkat

Daerah, pembayaran dana pensiunan masih belum terintegrasi secara maksimal dalam Kartu Pegawai Elektronik, hal ini disebabkan oleh proses “alih kekuasaan” yakni penggantian Walikota Bandar Lampung yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Edi Sutrisno yang digantikan oleh Bapak Herman H.N memberikan dampak yang signifikan, progress Kartu Pegawai Elektronik menjadi terhenti yaitu fungsi utama kerjasama dengan perbankan menjadi mandek.

Mekamisme prosedural yang dijalankan pada proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memenuhi standar sepenuhnya suatu kebijakan. Apabila dikomparasikan dengan standar yang telah ditentukan maka akan terlihat bahwa perhatian implementor terhadap aspek prosedural masih perlu dibenahi. Hal-hal yang bersifat prosedural memang sering kali hanya sebagai syarat formalitas berjalannya sebuah program kebijakan, tetapi persoalan yang dianggap sepele justru kadangkala menjadi penghambat kelancaran berjalannya sebuah kebijakan.

Mekanisme prosedural terkait dengan standar administratif, dimana proses sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat *seremonial*, sosialisasi hanya dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, padahal seharusnya sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik harus menggena kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang akan menggunakan Kartu Pegawai Elektronik. Kepala SKPD yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik tidak meneruskan informasi yang didapat kepada seluruh bawahannya, terkait dengan Jadwal Perkaman data Pegawai Negeri Sipil. Hasil observasi peneliti menemukan hal ini

terjadi pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang notabene memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang banyak.

Keterlibatan *Stakeholders* dalam hal ini pihak Perbankan dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung mutlak diperlukan demi keberhasilan suatu program. Pihak Perbankan dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik adalah Bank Lampung, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI) yang akan diajak kerjasama untuk memfungsikan Kartu Pegawai Elektronik sebagai Layanan Perbankan dan otentikasi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil terhenti dikarenakan pergantian Walikota. Kegagalan kerja sama yang dijalin oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Pihak Perbankan tentu saja membuat kebijakan yang ingin diimplementasikan tidak akan mampu berjalan dengan maksimal. Hasil observasi, peneliti menemukan hal diluar kemampuan Implementor dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik yaitu faktor pergantian Walikota ke Bapak Herman H.N yang menyebabkan proses ini terhenti.

Hasil observasi, peneliti menemukan kurangnya kemampuan dari Bank Pemerintah Daerah (BPD) dalam hal ini Bank Lampung dalam Otentikasi Pembayaran Gaji Pegawai Negari Sipil, hal ini bisa dilihat dari jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang Bank Lampung miliki, jelas tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sejumlah 11.480 Pegawai Negari Sipil. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan masalah baru bagi Pegawai Negari Sipil Kota Bandar Lampung dalam hal pembayaran gaji. Pada saat pembayaran gaji diawal bulan, Pegawai Negari Sipil bisa memenuhi

ATM Bank Lampung untuk menarik uang gaji, dengan jumlah ATM Bank Lampung yang terbatas tentu saja bisa membuat antrian yang panjang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian pada bagian pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan hasil yang tidak optimal, ini didasarkan atas tidak tercapainya fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik sebagai pengganti Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil (Karpeg PNS) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008. Peneliti menemukan hal diluar kemampuan Implementor dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik yaitu faktor pergantian Walikota ke Bapak Herman H.N yang menyebabkan proses ini terhenti. BKD sudah melakukan telaah staf ke Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 terkait fungsi KPE dan hasilnya BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS tanpa adanya layanan perbankan dalam KPE. Namun demikian, secara administratif telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut, yakni melakukan upaya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait proses implementasi KPE. Melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan melakukan kerjasama dengan pihak perbankan dalam Layanan Perbankan dan Otentikasi Pembayaran Gaji PNS.

2. Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki responsivitas yang tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan konversi Kartu Pegawai menjadi Kartu Pegawai Elektronik dengan berpartisipasi aktif dalam proses perekaman data Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dasar utama pembuatan KPE oleh Badan Kepegawaian Negara.
3. Proses Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya sebatas melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung minim informasi tentang KPE.

## **REKOMENDASI**

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang ditawarkan oleh peneliti sebagai sumbangan pemikiran guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi kembali dengan Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank Lampung dalam hal implementasi layanan perbankan otentikasi pembayaran Gaji PNS Kota Bandar Lampung. Melakukan Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung terkait teknis pelaksanaannya pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil melalui layanan perbankan. Membangun komunikasi dengan Pihak ASKES, Taspen, Bapertarum dalam implementasi layanan kepegawaian kesehatan, pensiunan pegawai, dan Tabungan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil. *Form ASKES.*

2. Melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait memfungsikan KPE dalam layanan perbankan. Melakukan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Memaksimalkan proses sosialisasi dengan memanfaatkan fasilitas Internet dengan memuat lebih banyak informasi KPE seperti Jadwal Perekaman data PNS kedalam website Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung sehingga PNS tidak melewatkan jadwal perekaman KPE, selain itu sosialisasi KPE bisa dilakukan dengan menyediakan Pamflet & Leaflet tentang Fungsi Kartu Pegawai Elektronik di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Maleong, Jlexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Miles, Mathew B, dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1992. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Surabaya.

- Parson, W., 1995. *Public Policy : An Introduction to the theory and practice of policy analysis*. Edward Elgar Publishing Limited : Cheltenham, UK.
- Patton, M.Q. 1980. *Qualitative Evaluation Methods*. Sage Publications : Beverly Hills, London.
- Rossi, P.H. H.E. Freeman, and S.R. Wright., 1979. *Evaluation : A Systematic Approach*. Sage Publications, Inc : Beverly Hills, London.
- Suharyo, Akhmad. 2012. *Kualitas Birokrasi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*. Indomedia. Jakarta,
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik*. Tarsito. Bandung.
- Wahab, Soliclin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- . 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Widodo, J., 2001. *Good Governance, Telaah dan Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia : Surabaya.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Garfindo Persada. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 125. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)
- Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 69/K/KS/VIII/2009 dan Nomor 800/1493/25/2009. Tentang *Kerjasama Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung*.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung Tahun 2013
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013